

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan yang didapatkan dari hasil dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Produksi Beras Dan Konsumsi Beras Dalam Negeri Terhadap Impor Beras Di Indonesia sebagai berikut:

1. Variabel produksi (X1) sebesar -4,545. Nilai  $t$  hitung tersebut berada di atas  $t$ -tabel sebesar -1,7613. Maka  $t$ -hitung >  $t$ -tabel,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Angka signifikan untuk variabel produksi sebesar 0,001, Sig. < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel produksi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia.
2. Variabel konsumsi (X2) beras memiliki koefisien regresi sebesar 13,617 yang berarti bahwa peningkatan konsumsi beras sebesar 1 ton akan meningkatkan impor beras di Indonesia sebesar 13,617%. Nilai  $t$  hitung >  $t$  tabel, yaitu 2,506 > 1,7613. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal

ini berarti variabel konsumsi beras memiliki pengaruh signifikan terhadap impor beras di Indonesia.

Kedua variabel ini memiliki margin error yang mana pada dasarnya margin ini tidak melebihi dari 0.5 hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan ini bisa saja berdampak sebaliknya bila dipengaruhi variable lain yang sesuai.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan perhatian mengenai kebijakan perberasan di Indonesia, khususnya pada sektor produksi. Produktifitas beras perlu ditingkatkan, mengingat lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya. Perlu adanya upaya khusus dalam menanggulangi hal tersebut, misalnya dengan meningkatkan teknologi dalam bidang pertanian serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan produktifitas beras kepada para petani. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat membantu menyejahterakan para petani Indonesia sehingga SDM yang bekerja di sektor pertanian tidak alih profesi atau

menjual lahan pertanian yang ada untuk dijadikan lahan non-pertanian.

2. Bagi pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap kebijakan mengenai perberasan yang telah ditetapkan. Karena kebijakan yang baik perlu disertai dengan pengawasan yang maksimal, sehingga tidak ada penyalahgunaan ataupun kesalahpahaman dalam menjalani suatu kebijakan.
3. Bagi pemerintah pusat diharapkan agar lebih memperhatikan dan memperketat pengawasan sarana dan prasarana pertanian dan hal-hal yang berkaitan seperti; irigasi, bibit, lumbung, distribusi, tempat pengolahan, pelabuhan, jalan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dari awal beras diproduksi sampai beras sampai ditangan konsumen dan juga untuk kelancaran dunia perberasan di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan diharapkan adanya peningkatan kualitas di pasar lokal maupun pasar internasional dan harga beras Indonesia mampu bersaing dengan beras-beras dari negara lain.
4. Bagi pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan intensif khusus bagi para petani dan pengusaha di bidang pertanian agar usaha di bidang pertanian dapat

berkembang. Intensif khusus dapat berupa; penyuluhan teknologi yang berhubungan dengan bidang pertanian, pembaharuan alat-alat pertanian, pengadaan pupuk dan bibit, penyuluhan mengenai manajemen dan pemasaran yang baik dalam bidang pertanian, serta upaya penanggulangan dan pencegahan bencana alam yang berkaitan dengan pertanian.

5. Bagi pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memantau dan mengawasi segala proses yang ada dalam dunia perberasan dengan baik dan seksama. Hal ini perlu dilakukan dan ditegaskan agar tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam dunia perberasan. Selain itu pemerintah perlu menindak tegas apabila ada kecurangan yang terjadi, agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dalam dunia perberasan sebagai sarana memperoleh keuntungan yang mampu merugikan banyak pihak.
6. Bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk selalu mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki dunia perberasan di Indonesia. Terutama dalam menjalankan kebijakan daerah (khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian) agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini tentunya perlu disertai dengan pengawasan serta ketegasan

akan mekanisme pertanian, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan memiliki dampak yang positif bagi Indonesia.

7. Bagi pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah agar lebih seksama dalam melakukan setiap pendataan, dan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih patuh dalam menjalani setiap kewajibannya sebagai warga negara, misalnya membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) tepat waktu sehingga data diri terdaftar di pusat. Apabila semua pihak terkait dapat melakukannya dengan seksama tentu hasil pendataan yang didapatkan akan lebih rinci dan tepat.